

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi madrasah pada dasarnya sama dengan sekolah, baik dalam jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat 2, menyebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain adalah sederajat. Kedua jenjang pendidikan dasar tersebut memiliki peluang sama dalam pencapaian kualitas lembaga pendidikan di Indonesia, walaupun Madrasah Ibtidaiyah berada dibawah tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag) yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Sekolah Dasar dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik).

Dalam konteks lingkungan global, tantangan akan peran pendidikan madrasah di Indonesia menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan visinya sebagai proses “*Character Building*”. Pendidikan madrasah harus mampu meningkatkan kualitasnya, sehingga memiliki keunggulan daya saing (*competitive advantage*) yang tinggi. Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal, merupakan ujung tombak dan paling menentukan dalam menciptakan suatu generasi yang mampu menghadapi tantangan global yang terjadi saat ini. Beberapa indikator esensial yang sangat menentukan kualitas sekolah sebagai input antara lain: siswa, kurikulum, sarana prasarana, biaya, pengelolaan dan lingkungan (Sukur, dkk., 2013).

Direktorat Pendidikan Madrasah (2007, hlm. 75), mengemukakan dalam upaya meningkatkan mutu madrasah perlu dilakukan pembenahan-pembenahan baik fisik maupun non fisik. Pembenahan fisik salah satunya dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat dan yayasan-yayasan swasta. Sedangkan dalam hal non fisik diantaranya kurikulum, strategi belajar mengajar, kualitas

tenaga pengajar dan manajemen madrasah. Selain itu, upaya peningkatan mutu madrasah dapat dilakukan dengan cara mengembangkan jaringan (*networking*) madrasah tersebut. Di era teknologi yang semakin modern saat ini, jaringan merupakan kebutuhan dan memiliki peranan sangat penting, dimana jaringan sebagai modal penting dalam persaingan, selain modal kapital juga sumberdaya (alam dan manusia) yang dimiliki madrasah.

Mutu madrasah dapat dilihat melalui hasil akreditasi dan hasil ujian nasional (UN) madrasah tersebut. UU Sisdiknas Pasal 1 Ayat 22, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi ditandai dengan peringkat A, B, C dan D. Standar ini merupakan standar baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses penilaian akreditasi dilakukan oleh lembaga yang berkompeten dalam penjaminan mutu, yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Data akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung pada Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Akreditasi MIS Kota Bandung
Tahun 2015

AKREDITASI	JUMLAH	PERSENTASE
A	18	27%
B	32	49%
C	6	9%
Belum	10	15%
TOTAL	66	100%

Sumber: Kemenag Kota Bandung (2015)

Berdasarkan tabel 1.1, Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung dengan nilai akreditasi A dan B pada Tahun 2015 berjumlah 50 madrasah (76%), dimana 18 madrasah terakreditasi A (27%) dan 32 madrasah terakreditasi B (49%) dari 66 madrasah. Adapun 6 madrasah terakreditasi C (9%) dan 10 madrasah belum

terakreditasi (15%). Hal ini menunjukkan bahwa mutu Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung belum optimal, dimana terdapat 32 madrasah terakreditasi B, 6 madrasah terakreditasi C dan 10 madrasah belum terakreditasi. Sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu madrasah menjadi sangat baik (akreditasi A) dan penilaian akreditasi dilakukan bagi madrasah yang belum terakreditasi.

Selain hasil akreditasi, faktor lain yang menunjukkan bahwa madrasah berkualitas adalah hasil ujian nasional (UN). Berikut merupakan hasil UN Tahun Pelajaran 2015/2016 pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung:

Tabel 1.2
Hasil UN MIS Kota Bandung
Tahun Pelajaran 2015/2016

NILAI UJIAN	B. IND	MAT	IPA
Rata-rata	63.49	53.87	61.91
Terendah	38.73	31.17	38.92
Tertinggi	82.87	79.67	82.50

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)

Berdasarkan tabel 1.2, hasil UN Tahun Pelajaran 2015/2016 pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung belum optimal, hal ini terlihat dari perolehan nilai terendah siswa belum sesuai dengan tingkat pencapaian kompetensi lulusan bahkan berada pada kategori kurang (nilai ≤ 55) yang telah ditentukan secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya peningkatan hasil UN oleh madrasah dari tahun ke tahun, sehingga tercapai kualitas hasil yang signifikan pada perolehan nilai UN siswa.

Menurut Evers (2010, hlm. 8), pengawas negara (*state superintendent*) Wisconsin Department of Public Instruction menyatakan bahwa:

Academic service-learning is an instructional tool that meaningfully engages students in their education, increases academic performance to develop globally competitive citizens, and transforms our communities into

vibrant centers of democracy. Teachers guide students through a learning process that facilitates high academic performance and empowers students to enact genuine social change on relevant issues. Academic service-learning can become a central focus in our schools with high quality professional development that transforms instructional practice. As part of a 21st century education plan, academic service-learning can help create systemic change that reduces dropout rates and narrows the achievement gap. This guide attempts to help educators understand and implement the basic principles of effective academic service-learning programs.

Dengan kata lain, layanan pembelajaran sebagai alat yang melibatkan siswa dalam pendidikan mereka, meningkatkan pelaksanaan akademik untuk bersaing dalam pengembangan kompetensi global dan mentransformasikannya pada sebuah komunitas. Guru mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran, dimana guru sebagai fasilitator untuk mencapai akademik tinggi dan mengarahkan siswa untuk menetapkan perubahan sosial yang benar dalam isu-isu relevan. Layanan pembelajaran dapat menjadi fokus utama dengan pengembangan profesional berkualitas tinggi yang mengubah praktek instruksional. Sebagai bagian dari rencana pendidikan abad ke-21, layanan pembelajaran dapat membantu menciptakan perubahan sistemik yang mengurangi angka putus sekolah dan mempersempit kesenjangan prestasi.

Mutu layanan di madrasah dapat terlihat selama proses pembelajaran berlangsung dan hasil belajar siswa. Mutu layanan pembelajaran diartikan sebagai kualitas layanan dalam pembelajaran yang diperoleh siswa meliputi mutu mengajar guru, kelancaran layanan, umpan balik, layanan keseharian, kenyamanan ruang kelas, dan hasil belajar. Pengukuran terhadap mutu layanan pembelajaran sebagai elemen penting dalam menyediakan layanan pembelajaran secara optimal, tentunya lebih baik, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, mutu layanan pembelajaran harus dimulai dari kebutuhan siswa sebagai konsumen dan akhirnya terbentuk persepsi mereka terhadap mutu layanan pembelajaran yang telah diberikan madrasah.

Siti Saniyyah Sholihat, 2017

PENGARUH PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP MUTU LAYANAN PEMBELAJARAN PADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kondisi empirik mutu layanan pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung, diantaranya sebagian guru jarang menggunakan sarana pembelajaran berbasis informasi teknologi (IT) seperti video dan audio, padahal penggunaan informasi teknologi (IT) saat ini memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran aktif, inovatif, komunikatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Umpan balik siswa dalam kegiatan pembelajaran belum optimal, kurang nyamannya ruang kelas (kondisi ruang kelas rusak ringan), dan hasil belajar siswa cukup tinggi (prestasi akademik).

Pengelolaan biaya pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung memerlukan peningkatan pada dimensi evaluasi, terutama kurangnya peran orangtua siswa dan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan biaya pendidikan di madrasah. Hal ini sebagai salah satu upaya orangtua dan masyarakat dalam mengontrol sejauh mana pengelolaan biaya pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan/atau dana orangtua siswa dapat berjalan efektif dan efisien. Sehingga pengelolaan tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran di madrasah.

Partisipasi masyarakat melalui komite madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung memerlukan peningkatan pada dimensi pendukung, terutama kurang aktifnya peran komite madrasah dalam memantau kondisi sarana dan prasarana, memobilisasi bantuan sarana dan prasarana, dan memantau kondisi anggaran pendidikan di madrasah. Ketersediaan fasilitas yang memadai dan kondisi anggaran pendidikan di madrasah, tentunya akan berdampak pada layanan pembelajaran yang diterima siswa.

Hasil penelitian Siregar (2009) mengenai “Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Pembelajaran” diperlukan adanya peran kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu layanan pembelajaran, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengelola Sarana dan Prasarana.
 - a. Perencanaan.

- b. Pengadaan (perpustakaan, laboratorium IPA, olahraga dan seni, laboratorium komputer, komputer, laptop/infokus, internet dan printer).
 - c. Penyaluran atau pendayagunaan.
 - d. Pemeliharaan dan pelaporan terhadap seluruh sarana prasarana sekolah.
2. Membina, Membimbing dan Memotivasi bawahannya.
- a. Membina dan membimbing para bawahannya, khususnya guru dengan cara mengadakan supervisi pengajaran.
 - b. Melakukan teguran, kritikan maupun saran untuk berbuat lebih baik dalam melaksanakan tugas.
 - c. Kesadaran untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. Memberikan saran dan memotivasi pada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar.
3. Menerapkan Kurikulum.
- a. Penetapan guru-guru mengajar sesuai dengan keahliannya.
 - b. Pembuatan perangkat pembelajaran.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan pengalaman mengajar guru-guru melalui penataran-penataran bidang studi, pelatihan, lokakarya dan pertemuan MGMP.
 - d. Mengoperasikan laptop dalam pelaksanaan pembelajaran.
 - e. Program pertemuan rutin.

Biaya pendidikan merupakan gambaran karakteristik keuangan di suatu lembaga pendidikan tertentu. Dalam rangka pemanfaatan sumber-sumber keuangan madrasah dan dampaknya terhadap hasil madrasah (*output*) yang berkualitas diperlukan efektivitas pengelolaan biaya pendidikan. Madrasah dituntut mengelola biaya pendidikan dengan efektif dan efisien sehingga dapat

memenuhi terselenggaranya pelaksanaan program-program pendidikan yang mendukung pembelajaran siswa. Mulyasa (2010), dalam dunia pendidikan kajian mengenai pembiayaan pendidikan menduduki posisi penting sebagai suatu upaya untuk memahami dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana/keuangan dalam lembaga pendidikan, termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Pengelolaan biaya pendidikan dalam skala mikro dapat meningkatkan nilai organisasi madrasah. Dalam hal ini sekolah melakukan pengelolaan biaya pendidikan tidak hanya mengenai sumber dana yang diperoleh dan digunakan untuk proses pendidikan, tetapi mengenai berbagai persoalan (resiko) yang terkait dengan pengelolaan keuangan, serta berbagai upaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelangsungan organisasi sekolah (Bastian, 2007). Kualitas pendidikan dapat terlihat dari biaya yang dikeluarkan dan pengendaliannya serta informasi laporan biaya, terutama tipe aktivitas dan *unit cost* yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan dan variasinya sangat ditentukan oleh kemampuan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan merupakan keikutsertaan memberikan gagasan, kritik membangun dan dukungan dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam rangka desentralisasi dan demokratisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan sekolah harus menjadi *partner* masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, karena kerjasama diantara keduanya sangat penting dalam membentuk pribadi siswa (Manalu, 2014). Hal ini erat kaitannya dengan prinsip komunikasi efektif antara sekolah dan masyarakat, dimana terjalin komunikasi dua arah yang saling memberikan kepuasan. Sehingga hubungan sekolah dengan masyarakat akan tumbuh ketika masyarakat dapat merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program-program sekolah tersebut.

Partisipasi masyarakat dapat berupa meluangkan waktu memantau kegiatan pendidikan, memberikan kontribusi dana untuk kelancaran biaya operasional

sekolah, menyampaikan saran dan gagasan untuk memecahkan permasalahan pendidikan di sekolah dan kepercayaan serta kemauan untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan sekolah hingga lebih kompetitif (Sagala, 2008). Keterlibatan orangtua sebagai bentuk peran serta masyarakat dengan dibentuknya komite madrasah dan dewan pendidikan. Keberadaan komite madrasah tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan.

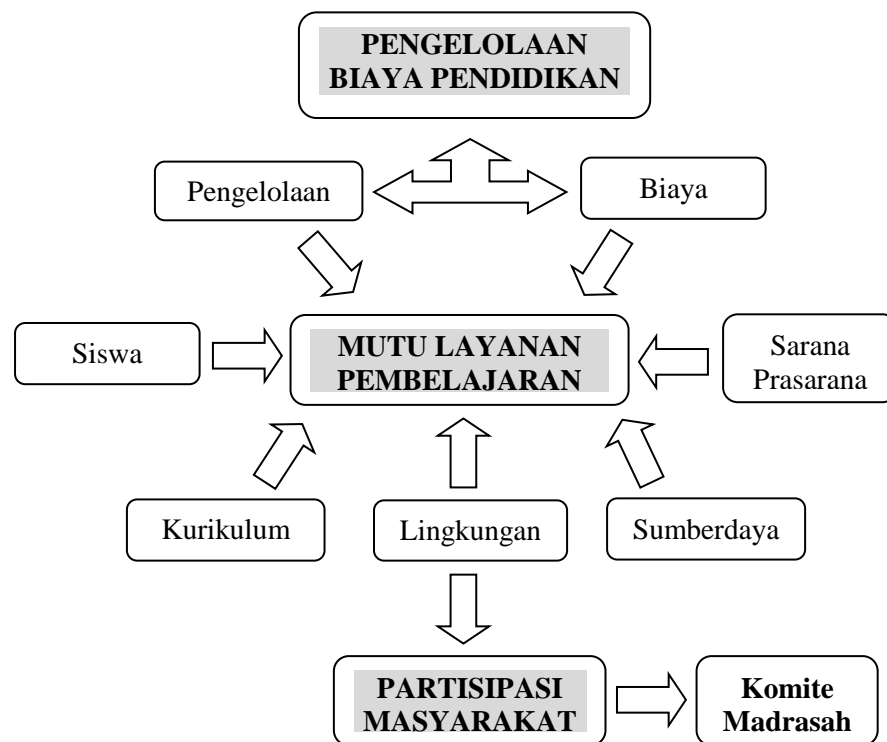
Hasil penelitian Suryono, dkk. (2013), mengenai “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 terhadap Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah”, menyatakan bahwa pemberdayaan komite sekolah, dimana (1) fungsi dan tugas komite sekolah baru pada penyusunan dan pengesahan RAPBS, (2) komite sekolah, kepala sekolah dan guru tidak menghendaki keterlibatan komite sekolah dalam masalah kebijakan teknis pendidikan di sekolah, (3) komite sekolah dengan sekolah belum memiliki sistem kemitraan hubungan kerja yang jelas, (4) tidak tersedianya anggaran komite sekolah dan (5) keterbatasan sumberdaya manusia komite sekolah.

Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan pengelolaan biaya pendidikan yang efektif dan efisien, dimana madrasah memberikan prioritas pada kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Partisipasi masyarakat dapat diikuti langsung oleh warga masyarakat maupun melalui lembaga seperti komite madrasah. Komite madrasah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kedua hal tersebut tentunya dapat mendukung terciptanya mutu layanan pembelajaran yang lebih optimal dan berdampak pada meningkatnya pencapaian hasil belajar siswa sebagai *output* pendidikan di madrasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah adalah belum optimalnya layanan pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota

Bandung. Hal ini terlihat dari kondisi empirik, hasil akreditasi dan hasil UN sebagai indikator-indikator yang menentukan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di madrasah. Faktor *instrumental input* seperti program/bahan pengajaran, sarana prasarana dan fasilitas serta tenaga pengajar (guru) mempengaruhi kualitas pembelajaran. Selain itu, faktor siswa dan lingkungan pun memiliki peran besar terselenggaranya proses dan hasil pembelajaran berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan madrasah. Keterkaitan pengelolaan biaya pendidikan (X1), partisipasi masyarakat (X2) dan mutu layanan pembelajaran (Y) dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambar 1.1, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu layanan pembelajaran diantaranya biaya, sarana prasarana, sumberdaya, lingkungan, kurikulum, siswa, dan pengelolaan. Penelitian ini berfokus pada tiga faktor, yaitu

pengelolaan, biaya, dan lingkungan. Faktor pengelolaan dan biaya menjadi variabel X1, yaitu Pengelolaan Biaya Pendidikan dan faktor lingkungan menjadi variabel X2, yaitu Partisipasi Masyarakat melalui Komite Madrasah.

Ketersediaan biaya untuk sarana prasarana madrasah sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM). Ketersediaan sarana prasarana akan tergantung pada dana yang ada, sehingga madrasah perlu melakukan pengelolaan biaya operasional secara efektif dan efisien. Keadaan madrasah yang memadai adalah madrasah yang didukung fasilitas laboratorium, perpustakaan dan fasilitas lainnya yang mendukung dalam pengembangan minat serta bakat siswa dan lokasinya terletak pada daerah yang sangat strategis dan lingkungan yang nyaman.

Pemahaman paradigmatis bagi komunitas pendidikan, baik dari sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan dan komite sekolah memiliki urgensi tinggi, mengingat keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah dalam kurun waktu yang panjang tidak memiliki fungsi dan tugas yang berarti bagi penentuan kebijakan pendidikan, sehingga berbagai kebijakan pendidikan hanya dibuat oleh internal dari komunitas pendidikan itu sendiri, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan sekolah (Siskandar, 2008, hlm. 5). Komite madrasah dapat dilibatkan dalam proses pembelajaran di madrasah, hal ini berkaitan dengan kesempatan yang dimiliki oleh komite madrasah dalam memahami dinamika masyarakat, sehingga madrasah mampu membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung?”. Adapun secara lebih spesifik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Pengelolaan Biaya Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung?
2. Bagaimana gambaran Partisipasi Masyarakat pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung?

3. Bagaimana gambaran Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Biaya Pendidikan terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung?
6. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan untuk teranalisisnya pengaruh Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan tersampaikan informasi objektif berkenaan dengan pengelolaan biaya pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap mutu layanan pembelajaran yang mendukung pada pelaksanaan program-program pendidikan di madrasah tersebut. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Terdeskripsikan Pengelolaan Biaya Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung.
2. Terdeskripsikan Partisipasi Masyarakat pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung.
3. Terdeskripsikan Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung.
4. Teranalisis pengaruh Pengelolaan Biaya Pendidikan terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung.

5. Teranalisis pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung.
6. Teranalisis pengaruh Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan khasanah ilmu kajian administrasi pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan biaya pendidikan, partisipasi masyarakat dan mutu layanan pembelajaran di madrasah.
 - b. Bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat dari Segi Kebijakan

Kepmendiknas No.129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan belum terealisasi optimal, dimana fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata, sehingga menyebabkan sulitnya siswa mengakses layanan pendidikan. Selain itu, kualitas pelayanan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi siswa.

Manfaat penelitian:

- a. Masukan bagi madrasah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran melalui optimalisasi ketersediaan fasilitas berupa sarana prasarana pembelajaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.

- b. Masukan bagi pemerintah daerah melalui Kemenag dalam upaya penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan secara merata untuk setiap madrasah.
3. Manfaat Praktis
 - a. Bagi madrasah, sebagai masukan dan gambaran tentang kondisi lembaga dalam menerapkan konsep pengelolaan biaya pendidikan yang efektif dan efisien, upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui komite madrasah dan mutu madrasah melalui optimalisasi layanan pembelajaran.
 - b. Bagi masyarakat, sebagai masukan dan gambaran pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan madrasah, secara langsung sebagai orangtua maupun melalui komite madrasah.
 - c. Bagi yayasan, memberikan sumbangan pemikiran dalam hal menganalisis aspek-aspek yang menyangkut pengelolaan biaya pendidikan, partisipasi masyarakat dan mutu layanan pembelajaran untuk kelangsungan visi dan misi lembaga madrasah.
 - d. Bagi peneliti, menambah wawasan tentang pengelolaan biaya pendidikan, partisipasi masyarakat dan mutu layanan pembelajaran.
 4. Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial
 - a. Bagi madrasah, sebagai masukan dan gambaran pentingnya akreditasi sebagai dampak dari upaya meningkatkan mutu madrasah terutama layanan pembelajaran.
 - b. Bagi masyarakat, sebagai masukan dan gambaran pentingnya partisipasi masyarakat melalui komite madrasah terhadap upaya meningkatkan mutu layanan pembelajaran.

E. Struktur Organisasi Tesis

Penulisan tesis yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung” terdiri dari:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi tesis.

2. Bab II: Kajian Pustaka/Landasan Teoretis

Bab ini membahas tentang (a) konsep-konsep, teori-teori dan dalil-dalil tentang Pengelolaan Biaya Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan Mutu Layanan Pembelajaran; (b) penelitian terdahulu yang relevan, termasuk prosedur, subjek dan temuannya; serta (c) posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yaitu belum optimalnya layanan pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.

4. Bab IV: Temuan dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang (a) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian dan (b) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

5. Bab V: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bab ini membahas tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian serta mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.

